

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain Sistem Pengendalian Internal, PP Nomor 60 Tahun 2008 juga menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang definisinya adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut COSO (2013:3) Sistem Pengendalian Internal juga dapat didefinisikan sebagai sistem yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia suatu entitas yang terdiri dari direksi, manajemen dan pegawai lainnya yang mana hal itu dirancang untuk memberikan keyakinan terhadap suatu pencapaian sebuah entitas dalam mencapai sebuah efektivitas & efesiensi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dimonitor oleh pimpinan dan personel entitas yang bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Menurut (Hery 2014) Sistem Pengendalian Internal adalah strategi atau kebijakan yang ada dalam suatu entitas guna melindungi harta atau aset dari penyelewengan, memastikan adanya informasi akuntansi yang akurat, memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa kebijakan manajemen sudah dijalankan oleh seluruh karyawan yang ada pada suatu entitas tersebut.

Menurut Keputusan BPK RI Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPD menyebutkan bahwa temuan sistem pengendalian internal adalah temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah:

1. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas serta efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset Negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa Sistem Pengendalian memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut PP nomor 60 Tahun 2008 lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan dalam instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.

Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Kepemimpinan yang kondusif
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait

2. Penilaian Risiko

Menurut PP nomor 60 Tahun 2008 penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Dan dalam rangka penerapan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan maksud tujuan dari instansi dengan jelas dan konsisten baik pada tingkatan instansi pemerintahan maupun tingkatan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Menurut PP nomor 60 Tahun 2008 kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas serta fungsi instansi yang bersangkutan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b) Pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia)
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

- d) Pengendalian fisik atas aset
- e) Penetapan dan rivi u atas indicator dan ukuran kinerja
- f) Pemisahan fungsi
- g) Otoriasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan nya
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan nya
- k) Dokumentasi yang baik atas SPI (Sistem Pengendalian Intern) serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan definisi komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Menurut COSO (2013:5) informasi diperlukan untuk suatu entitas dalam melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal sebagai pendukung tercapainya suatu tujuan. Informasi yang dimiliki suatu instansi harus informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan definisi dari pemantauan pengendalian adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, rekonsiliasi, pembandingan, serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah dilakukan dengan penilaian sendiri, reviu, serta pengujian efektivitas SPI yang dapat dikerjakan oleh aparat pengawasan internal atau eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian internal.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya dilaksanakan dan diselesaikan secepatnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya yang sudah ditetapkan.

2.1.1.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

COSO (2013:9) mengungkapkan bahwa keterbatasan Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan yang ditetapkan sebagai prasyarat untuk pengendalian internal tidak tepat
2. Penilaian manusia bisa salah dan bias dalam mengambil sebuah keputusan

3. Manusia melakukan kesalahan ataupun kegagalan sebagai pelaksana pengendalian
4. Manajemen mengabaikan pengendalian internal
5. Kemampuan manajemen, pihak lain atau pihak ketiga untuk menghindari pengendalian dari tindakan kolusi
6. Kejadian kejadian eksternal yang ada di luar kendali instansi

Sedangkan menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP keterbatasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu:

1. Pimpinan instansi pemerintah masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya sistem pengendalian intern.
2. Perspektif pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai.
3. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh personil, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2.1.2 Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021 definisi kepatuhan adalah temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan terkait lainnya. Yang mana semua ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Definisi Peraturan Perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan secara sewenang-wenangnya karena peraturan seharusnya dilakukan dengan itikad baik serta dengan penuh rasa tanggung jawab.

2.1.2.2 Jenis Jenis Kepatuhan

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021 jenis-jenis temuan kepatuhan terdiri dari 5 jenis yaitu:

1. Temuan yang mengindikasikan terjadinya kerugian daerah, adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang ada sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja.
2. Potensi kerugian daerah, adalah perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa mendatang berupa berkurangnya uang, surat berharga, serta barang.
3. Kekurangan penerimaan, adalah adanya penerimaan yang seharusnya menjadi hak suatu daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah

karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Temuan administrasi, adalah temuan yang mengungkapkan adanya sebuah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, namun penyimpangan tersebut tidak menimbulkan potensi kerugian daerah, tidak menghambat program entitas, tidak mengurangi hak daerah.
5. Indikasi Tindak Pidana, adalah temuan yang mengungkapkan adanya sebuah penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara seperti tindak pidana korupsi, suap menyuap dan gratifikasi.

2.1.2.3 Peraturan Perundang-undangan yang digunakan Sebagai Acuan Dalam Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor atau pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyusun standar pemeriksaan yang disebut dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dibuat pada tahun 2007. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan serta standar pelaporan yang mana hal tersebut harus dijadikan pedoman bagi auditor BPK.

Dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan, BPK menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah serta permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah

2.1.3 Opini BPK Atas LKPD

2.1.3.1 Definisi Opini Audit

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 definisi opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Mulyadi (2014:19) menjelaskan bahwa definisi opini yaitu merupakan pendapat yang diberikan oleh pemeriksa atau auditor terhadap suatu entitas atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

2.1.3.2 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:110) tujuan audit yaitu untuk menyatakan pendapat atau opini atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.

Menurut Tuannakotta (2014:84) menyatakan bahwa tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, kepada laporan keuangan tersebut. Tujuan itu dapat dicapai dengan pemberian opini yang diberikan oleh auditor mengenai kondisi laporan keuangan apakah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material dan sesuai dengan

kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2.1.3.3 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 terdapat beberapa kriteria dalam pemberian opini yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kecukupan Pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas SPI

Semua kriteria yang disebutkan di atas berdampak terhadap pemberian opini atas LKPD, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran atau ketidaksesuaian dari kriteria yang telah ditentukan tersebut maka opini yang diberikan akan menjadi opini yang buruk terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jenis-jenis opini audit diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan dan diungkapkan secara wajar serta bebas dari segala salah saji material. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan sertadiungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Hal-hal yang membuat auditor memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi dan adanya pembatasan lingkup (ketidacukupan bukti).

3. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan dengan wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*), adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa oleh auditor karena adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai untuk dijadikan dasar menyatakan opini.

2.1.3.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan defisini laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dalam pasal 1 ayat 1 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah

adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah mengenai laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas. Maka dari itu pemerintah harus menyajikan laporan keuangan secara wajar serta diungkapkan secara lengkap agar terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Menurut PP nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sedikitnya terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.4 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Ahmad Faishol (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Amalia Nur Alfiani, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Laporan

- Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah temuan audit atas SPI dan kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015.
3. Darmawati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Terhadap Perundang - Undangan, Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini BPK RI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini BPK RI.
 4. Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI dan Kepatuhan Peraturan Perundang- undangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP, Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan Opini WTP dan Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada penerimaan opini WTP.
 5. Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno & Novi Puspitasari (2016) melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)”. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pengendalian

Internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara.

6. Ira Gustina (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (kecenderungan kecurangan akuntansi) pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Mimelientesa Irman dan Suryati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011- 2014”. Hasil dari penelitian ini adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit, ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh pada penerimaan opini WTP sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif pada opini WTP dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada opini WTP.
8. Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri & Darsono (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh kelemahan SPI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini WTP sedangkan temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-

undangan dan opini tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit.

9. Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitrioso (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Dana Insentif Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Intervening”. Hasil dari penelitian ini adalah SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini LKPD sedangkan dana insentif dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap opini LKPD, SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tindak lanjut rekomendasi audit sedangkan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi audit, serta SPI dan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi sedangkan kepatuhan berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi.
10. Oka Purnawan Widodo & Sudarno (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan opini pemeriksaan BPK atas LKPD.
11. Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

12. Nuhoni Nalurita (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundangan-Undangan, dan Karakteristik Daerah Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kelemahan SPI berpengaruh negative terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, Total aset sebagai nilai dari ukuran (size) tidak berpengaruh terhadap penentuan kredibilitas laporan keuangan Pemerintah daerah, Ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah serta Opini tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kredibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini diwakili oleh opini BPK.
13. BRM. Suryo Triono & Septiana Novita Dewi (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi, komunikasi serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah sedangkan kegiatan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

14. Dewi Rahmasari (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Total Aset Terhadap Opini Audit Dengan Tingkat Pengungkapan Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Sebagai Variabel Intervening”. Hasil dari penelitian ini adalah SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan serta tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap opini audit.
15. Juanda Surya & Suparno (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2015.
16. Jumadi Rudiansyah (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera”. Hasil dari penelitian tersebut adalah temuan atas SPI dan temuan atas

pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit.

17. Maulidya Rahmi, Nita Erika Ariani (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
18. Tuti Herawati (2014) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Lalu terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, serta informasi & komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan selanjutnya terdapat pengaruh tidak signifikan antara kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial.
19. Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

20. Nanda Subhan Liandi (2021) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) “ (Survei pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap opini BPK Atas LKPD pada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2021. Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK Atas LKPD pada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2021. Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini BPK Atas LKPD pada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2021 menunjukan kondisi yang baik.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian

No.	Nama, Tahun, Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
-----	---------------------------	-----------	-----------	------------------	--------

1. Ahmad Faishol (2016)	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal	Variabel Dependen : Kualitas laporan keuangan	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume 1 No. 3, Oktober 2016. ISSN 2502-3764
2. Amalia Nur Alfiani, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti (2017)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Intern - Kepatuhan Variabel Dependen : - Opini LKPD	Tempat penelitian	Jumlah temuan auditatas SPI dan kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015.	Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9 No. 1, April 2017, Halaman 12-18. ISSN 2088-5091
3. Darmawati (2017)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan Variabel Dependen : Opini BPK	Variabel Independen : - Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan - Tempat penelitian	Kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini	Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Tahun 2017.
4. Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli (2014)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Interna - Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Variabel Independen : - Opini Audit Tahun Sebelumnya - Umur Pemerintah Daerah Variabel Dependen : - Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPD	- SPI dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP. - Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan Opini WTP.	Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 1, Oktober 2014. Halaman 1-15.

			diSeluruh Indonesia	- Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada penerimaan opini WTP.	
5.	Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno & Novi Puspitasari (2016)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal	Variabel Dependen : - Pengelolaan Keuangan Daerah - Kinerja Pemerintah Daerah	SPI berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara.	Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 10 No. 1, Januari 2016. Halaman 68 – 81.
6.	Ira Gustina (2018)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal	Variabel independen : - Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu	SPI dan Ketaatan Aturan Akuntansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (kecenderungan kecurangan akuntansi) pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7 No.2, Juli – Desember 2018. ISSN 2089-6255
7.	Mimeliente sa Irman dan Suryati (2017)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Ketidakpatuhan pada perundang-undangan	Variabel Independen : - Opini Audit Tahun Sebelumnya - Umur Pemerintah Daerah Variabel Dependen : Opini Audit di Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2011 – 2014	- Kelemahan SPI dinilai berpengaruh negative terhadap penerimaan opini Audit, Ketidakpatuhan padaPerundang-undangan berpengaruh pada penerimaan opini WTP. - Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif pada opini WTP dan umur pemerintah daerah tidak	KURS Vol.2 No. 2, Desember 2017. e-ISSN 2527-8215

				berpengaruh pada opini WTP.	
8.	Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri & Darsono (2015)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Temuan Kepatuhan Variabel Dependen : Opini Audit pada Pemda	Tempat Penelitian	- Pengaruh kelemahan SPI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini WTP - Temuan ketidakpatuhan peraturan perundang- undangan dan opini tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit.	Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2015, Halaman 1- 12. ISSN (Online): 2337-3806
9.	Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitrios (2020)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Kepatuhan pada Peraturan - Perundang- undangan Variabel Dependen : Opini LKPD	Variabel intervening : -Tindak lanjut rekomendasi audit	- SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini LKPD sedangkan dana insentif dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap opiniLKPD - SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tindak lanjut rekomendasi audit sedangkan dana insentif daerah tidak berpengaruh	Jurnal Akuntansi, Volume 8, Nomor 2, April 2020. Halaman 123 – 135. ISSN 2337- 4314

				terhadap tindak lanjut rekomendasi audit	
				- SPI dan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi sedangkan kepatuhan berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi	
10.	Oka Purnawan Widodo & Sudarno (2017)	Variabel Independen : - Temuan Kelemahan SPI - Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Variabel Dependen : - Opini BPK atas LKPD	- Metodologi Penelitian - Tempat penelitian	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan opini pemeriksaan BPK atas LKPD.	Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 1 – 9. ISSN (Online) : 2337 – 3806
11.	Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo (2014)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal	Variabel independen : - Kekuatan Koersif Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah - Kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2, Nomor 1, Tahun 2014. ISSN 276 – 288

12.	Nuhoni Nalurita (2015)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Kepatuhan Terhadap Perundang- undangan	Variabel Independen : - Karakteristik Daerah Variabel Dependen : Kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	- Kelemahan SPI berpengaruh negative terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah - Ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Ketergantunga n pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah - Opini tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah	Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2015
-----	------------------------------	---	--	--	---

13.	BRM. Suryo Triono & Septiana Novita Dewi (2020)	Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal	Variabel Dependen : -Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Kegiatan Pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 21. Nomor 1, Tahun 2020. ISSN 213 – 220
14.	Dewi Rahmasari (2017)	Variabel Independen : - SPI - Kepatuhan Terhadap Perundang- undangan Variabel Dependen : - Opini Audit	Variabel independen : - Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan - Total Aset Variabel Intervening : - Tingkat Pengungkap anpada CALK Kementerian / Lembaga	- SPI dan kepatuhan terhadap perundang- undangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan - Total Aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan - Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap opini	Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Tahun 2017.

 audit

15.	Juanda Surya & Suparno (2019)	Variabel Independen : - SPI Variabel Dependen : - Opini Audit	Variabel Independen : - Peran masyarakat madani	Indeks pembangunan manusia, tingkat Pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, dan sistem pengendalian intern secara bersama- sama berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2015.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 4, No. 2, (2019) Halaman 259-269. E-ISSN 2581-1002
16.	Jumadi Rudiansyah (2017)	Variabel Dependen : - Opini Audit	Variabel Independen : - Jumlah Temuan Audit	Temuan atas SPI dan temuan atas Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan berpengaruh negative terhadap opini audit.	Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Tahun 2017.
17.	Maulidya Rahmi, Nita Erika Ariani (2020)	Variabel Dependen : - Opini Atas LKPD	Variabel Independen : Temuan Audit Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan berpengaruh negative terhadap opini atas laporan keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 5, No. 4, November 2020; Halaman 497-505. E-ISSN 2581-100

18.	Tuti Herawati (2014)	Variabel Independen : - SPI	Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan	- Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan - Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. - Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	STAR – Study & Accounting Research, Vol XI, No.1 – 2014. ISSN : 1693-4482
19.	Novtania Mokoginta , Linda Lambey , Winston Pontoh (2017)	Variabel Independen : - SPI	Variabel Independen : - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	- SPI berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 874-890

20.	Nanda Subhan Liandi (2021)	Variabel Independen : - SPI	Variabel Independen : - Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Variabel Dependen : Opini BPK Atas LKPD	- Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap opini BPK Atas LKPD pada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2021. - Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK Atas LKPD pada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2021. - Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Ketentuan - Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini BPK Atas LKPD pada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2021 menunjukkan kondisi yang baik.	Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Tahun 2021. Repositori Universitas Siliwangi
Muhammad Ade Alvien Liandi (2024) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten Di Kalimantan Selatan Tahun 2023)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risks yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen.

Dengan menggunakan Grand Theory Agency, penulis dapat memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan berkontribusi terhadap penilaian opini BPK, dan bagaimana hubungan antara agen dan principal mempengaruhi hasil tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yaitu Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan terkait lainnya. (Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. (UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Dalam pelaksanaannya, sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu entitas atau instansi pemerintahan dalam menyediakan laporan keuangan yang andal. Selain itu, Sistem pengendalian internal yang efektif juga akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas informasi pelaporan keuangan sehingga entitas pemerintahan dapat memperoleh predikat opini tertinggi. Maka dari itu agar terbentuknya sistem

pengendalian internal yang baik dan pelaporan keuangan yang andal, penulis akan memaparkan beberapa dimensi yaitu: 1. Sistem Pengendalian Akuntansi 2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 3. Kelemahan struktur pengendalian internal (IHPS BPK Tahun 2016)

Salah satu kriteria pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. temuan ketidakpatuhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan :1) Kerugian Daerah 2) Potensi Kerugian 3)Kekurangan Penerimaan 4) Penyimpangan/Temuan Administrasi

Dalam penentuan pemberian opini, auditor BPK memiliki beberapa kriteria yang tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian internal. Seluruh kriteria tersebut sangat berdampak terhadap pemberian opini atas LKPD, jika semakin banyak penyelewengan atau ketidaksesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan kriteria tersebut maka akan semakin buruk penilaian yang akan diberikan auditor terhadap LKPD tersebut. Maka dari itu penulis ingin memaparkan beberapa jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa Negara dan di jadikan sebagai dimensi dalam penelitian ini. 1) Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2) Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 3) Opini TW (Tidak Wajar) 4) Opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat)

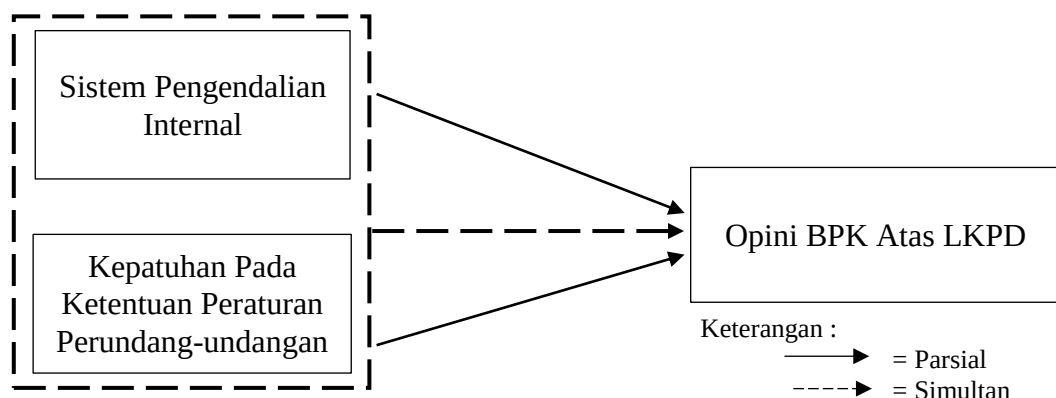
Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 pada paragraf penjelas pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya suatu opini yang didapatkan oleh pemerintah daerah dinilai dari efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan setiap kegiatannya. Apabila sistem pengendalian internal dan tingkat kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan semakin baik maka opini yang akan diterima oleh entitas pemerintah daerah nantinya pun merupakan opini terbaik yaitu opini wajar tanpa pengecualian.

Mimelientesa Irman dan Suryati (2017), Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitrios (2020), Oka Purnawan Widodo & Sudarno (2017) dan Nuhoni Nalurita (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Opini BPK. Sementara itu Darmawati (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Sistem Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK. Selain itu, Amalia Nur Alfiani, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti (2017) dan Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri & Darsono (2015) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap opini BPK.

Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitrios (2020), Oka Purnawan Widodo & Sudarno (2017), dan Nuhoni Nalurita (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

berpengaruh negatif terhadap opini BPK. Darmawati (2017) menyatakan bahwa ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini BPK RI dimana semakin rendah temuan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan pada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maka opini yang diberikan oleh BPK akan semakin baik. Mimelientesa Irman dan Suryati (2017) menyatakan bahwa ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh pada penerimaan opini WTP. Sementara itu menurut Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri & Darsono (2015) menyatakan bahwa temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit. Sedangkan menurut Amalia Nur Alfiani, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti (2017) menyatakan bahwa kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini BPK atas LKPD namun Hadyan Yuhridza (2018) menyatakan bahwa kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap Opini Audit Atas LKPD.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan di atas serta hasil dari penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara parsial berpengaruh terhadap Opini BPK atas LKPD
2. Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara simultan berpengaruh terhadap Opini BPK atas LKPD.